



PERAN KOMITE PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL LAOS (NDMC) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LAOS TAHUN 2018 GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL

THE ROLE OF THE LAOS NATIONAL DISASTER MANAGEMENT COMMITTEE (NDMC) IN DISASTER MANAGEMENT IN LAOS IN 2018 TO SUPPORT NATIONAL SECURITY

Ketsana Sengdara^{1*}, Achmed Sukendro², Heridadi³, Wilopo⁴

¹ Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

² Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

³ Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

⁴ Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

Sejarah Artikel

Diterima:

Disetujui:

Dipublikasikan:

Abstract

Laos is a landlocked country that has no maritime boundaries with other countries. Although Laos is a country that rarely experiences disasters, in 2018 there was a flash flood that hit the province of Attapeu. The flash flood resulted in 49 deaths and 22 missing people and resulted in various losses suffered. The Lao National Disaster Management Committee has a great responsibility to carry out disaster management in Laos so that disaster risks can be minimized. The purpose of this study was to determine the role of the Lao National Disaster Management Committee in the disasters that occurred in 2018. The methodology used in this study used a descriptive qualitative research methodology based on a literature review. The results of this study reveal the various efforts made by the Lao National Disaster Management Committee at each stage of disaster management. In the Surveillance, Monitoring and Alert stage, the focus is on monitoring, monitoring and early warning of disasters that may occur naturally. Then at the stage of The Control and Provision of Emergency Aid During the Disaster Incidents, what is done is the control and provision of emergency assistance during disaster incidents. In the Disaster Recovery stage, repair, build and restore infrastructure affected and or damaged by the disaster back to a normal or even better situation.

Kata Kunci

Bencana;
Penanggulangan;
Keamanan Nasional;
Laos.

Abstrak

Laos adalah negara yang terkurung daratan yang tidak memiliki batas laut dengan negara lain. Meskipun Laos termasuk negara yang jarang terjadi bencana, namun pada 2018 terjadi banjir bandang yang menerjang provinsi Attapeu. Banjir bandang tersebut mengakibatkan korban sebanyak 49 orang tewas dan 22 orang hilang serta mengakibatkan berbagai kerugian yang dialami. Komite Penanggulangan Bencana Nasional Laos memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan



penanggulangan bencana di Laos agar risiko bencana dapat di minimalisir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Komite Penanggulangan Bencana Nasional Laos terhadap bencana yang terjadi pada tahun 2018. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang berlandaskan dengan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan berbagai upaya yang dilakukan Komite Penanggulangan Bencana Nasional Laos pada setiap tahap manajemen bencana. Pada tahap *Surveillance, Monitoring and Alert* berfokus pada pengawasan, pemantauan dan peringatan dini mengenai bencana yang mungkin terjadi secara alami. Lalu pada tahap *The Control and Provision of Emergency Aid During the Disaster Incidents* yang dilakukan adalah kontrol dan pemberian bantuan darurat selama insiden bencana. Pada tahap *The Disaster Recovery* memperbaiki, membangun dan memulihkan infrastruktur yang terkena dampak dan atau rusak oleh bencana kembali untuk situasi normal atau bahkan lebih baik.

DOI:
10.33172/jmb.xxxx.xx-
01

e-ISSN: 2716-4462
© 20xx Published by Program Studi Manajemen Bencana
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

***Corresponding Author:**

Ketsana Sengdara
Email: yasengdara@gmail.com



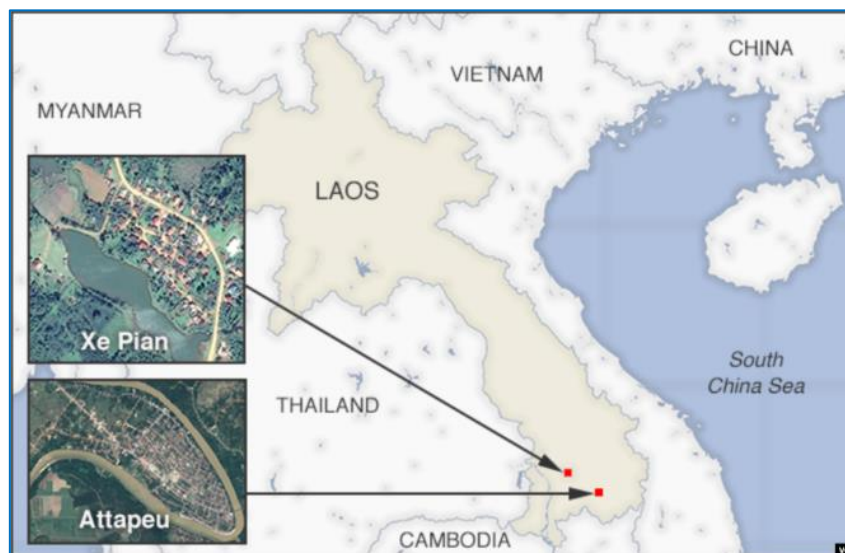
PENDAHULUAN

Laos adalah negara yang terkurung daratan(Land Locked) yang terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan China di Utara. Total luas daratan mencakup sekitar 236.800 km², yang terdiri dari berbagai ekosistem dalam berbagai tingkat ketinggian. Karena topografi pegunungan, hanya sekitar 6,2% dari total luas lahan yang tergolong subur (CFE-DM, 2017). Perbatasan barat sebagian besar mengikuti sungai Mekong, yang juga merupakan pusat produksi pertanian karena kesuburan lembah sungai. Secara administratif Laos dibagi menjadi tiga tingkatan, tingkat pertama terdiri dari 17 provinsi dan satu kotamadya yang menampung ibu kota Vientiane. Provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi menjadi 142 kabupaten, yang terdiri dari 11.390 desa (Pemerintah Laos, 2014).

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian yang meluas pad kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (UNISDR, 2009).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24, 2007).

Salah satu peristiwa terbesar yang di alami Lao terjadi pada Juli 2018 di Provinsi Attapeu yang terletak di bagian laos selatan yang berbatasan dengan Kamboja dan Vietnam. Pada kejadian itu, bendungan dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Xe Pian-Xe Namnoy di Laos runtuh, melepaskan dinding air yang menyebabkan 49 orang tewas dan 22 hilang. Runtuhnya mengakibatkan pengungsian ribuan orang, dan membanjiri rumah dan desa. Lebih dari 7.000 orang di 19 desa di provinsi Attapeu mengalami kerugian dan kerusakan jangka panjang pada rumah, properti, dan lahan pertanian. Banjir meluas jauh ke hilir hingga perbatasan Kamboja, memengaruhi sekitar 15.000 orang, merusak lahan pertanian dan menghancurkan ternak dan properti (Lao PDR, 2018).



Gambar 1. Lokasi Bencana di Provinsi Attapeu

Komite Penanggulangan Bencana Nasional Laos (NDMC) adalah badan non-partisan yang bertindak sebagai petugas penghubung dalam penelitian dan koordinasi dengan departemen terkait dan otoritas lokal untuk menerapkan manajemen bencana.

NDMC memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam mengarahkan, memantau, dan mendorong kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk meneliti dan menerapkan kebijakan, strategi, undang-undang, peraturan, tindakan, perencanaan, program, dan proyek tentang penanggulangan bencana (Hukum Penanggulangan Bencana Laos, 2019).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai (<https://bnpb.go.id/definisi-bencana>).

Banjir Bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dengan dahsyat. Banjir jenis ini terjadi dalam rentang waktu yang tidak lama setelah hujan lebat (beberapa menit hingga beberapa jam), yang terjadi di sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS) atau alur sungai yang sempit di bagian hulu. Banjir bandang biasa terjadi di daerah dengan sungai yang terhambat oleh sampah. Banjir bandang memiliki karakteristik yang berbeda dari banjir biasa, diantaranya:

- a. Mempunyai debit puncak yang melonjak secara tiba-tiba dan menyurut kembali dengan cepat;
- b. Mempunyai volume dan kecepatan aliran yang besar;
- c. Mempunyai kapasitas angkutan aliran dan daya erosi yang sangat besar sehingga dapat membawa material hasil erosi, seperti kaki tebing, dasar alur sungai, dan bahan rombakan bendungan alam dari hulu menuju arah hilir;
- d. Materials debris yang terbawa oleh aliran banjir dapat menimbulkan bencana sedimen di daerah hilir (Paidi, 2012).

Dari penelitian yang diteliti oleh Sanit, dkk yang berjudul strategi mitigasi bencana banjir bandang berdasarkan nilai ketangguhan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur mendapatkan hasil bahwa penilaian tingkat ketangguhan di Kabupaten Malaka yang diselesaikan melalui penilaian 8 kriteria (tata ruang, infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, sosial ekonomi, penelitian teknologi & ekosistem, perencanaan dan perizinan, kemampuan dasar stakeholder dan kesiapsiagaan stakeholder dan kelembagaan & anggaran), 52 indikator penilaian parameter penilaian 1-5 dimana, nilai 1 sangat rendah, nilai 2 rendah, nilai 3 sedang, nilai 4 tinggi / baik dan nilai 5 sangat tinggi / baik. Penilaian dari 9 kriteria penilaian di atas tingkat ketangguhan di Kabupaten Malaka menghasilkan nilai keseluruhan 114 yang memberi kesimpulan bahwa tingkat ketangguhan di Kabupaten Malaka terhadap bencana adalah tingkatan "Rendah". Berdasarkan hasil pengelompokan strategi mitigasi bencana banjir bandang diatas menurut tingkat ketangguhan dan kelas bahaya, kriteria mitigasi yang diterapkan di Kabupaten Malaka adalah Kriteria mitigasi Adaptasi, Proteksi dan Relokasi. Sedangkan jenis mitigasi tergolong dalam jenis mitigasi struktural dan non struktural.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia upaya mitigasi bencana banjir bandang dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :

1. Menjalankan program pemeliharaan.

Masyarakat perlu di ajakan dalam program pemeliharaan pertinggian permukaan tanggul, perbaikan tanggul yang bocor, pelindung batu untuk tanggul dekat penambangan, penggantian peralatan pintu dan sebagainya yang tidak berfungsi disebabkan oleh kerusakan. Kegiatan pemeliharaan ini perlu di lakukan secara berkala hal ini menjadi upaya dalam mitigasi bencana banjir bandang. Selain itu ada juga pemeliharaan darurat. Pemeliharaan darurat, adalah pemeliharaan yang harus dilaksanakan segera agar kerusakan yang terjadi atau kerusakan yang hampir terjadi tidak menjadi lebih parah, dimana pekerjaan tersebut penting untuk melindungi keutuhan dan kekuatan bangunan (dalam skala besar). Hal ini menjadi salah satu upaya dalam mencegah dan mengurangi dampak dari resiko bencana banjir bandang.

2. Penanggulangan Bencana Banjir Bandang

Sebagai upaya mitigasi bencana banjir bandang, Penanggulangan bencana perlu di lakukan. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya dari pemerintah dan elemen masyarakat yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang bisa berisiko timbulnya bencana banjir, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Peringatan dini yaitu pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang sebagai salah satu upaya mitigasi banjir bandang langsung kepada masyarakat terdampak (Kementerian Kesehatan, 2016).

METODE PENELITIAN

Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai sumber dan penelitian terdahulu dari berbagai jurnal serta data sekunder yang didapatkan melalui berbagai website serta dokumen-dokumen instansi terkait dengan bencana banjir bandang (Sugiyono, 2017). Penelitian ini berfokus pada peristiwa bencana di negara Laos pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif yang berarti bahwa setelah peneliti mendapatkan data primer maupun sekunder dari berbagai sumber, lalu peneliti mendeskripsikan data tersebut sehingga dapat membentuk tulisan yang dapat dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antara Juli dan September 2018, Laos mengalami banjir besar yang secara signifikan mempengaruhi masyarakat dan perekonomiannya. Pada 18-19 Juli, Tropis Badai Son-Tinh menyebabkan hujan lebat dan banjir di 55 kabupaten dari 13 provinsi di seluruh Indonesia. Pada 23-24 Juli, pelanggaran di Xe Pien-Xe Namnoy Bendungan pelana tenaga air menyebabkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya banjir bandang di Provinsi Attapeu; hasilnya selesai lima miliar meter kubik air sama dengan dua juta kolam renang ukuran Olimpiade membanjiri dan diperkirakan 55.000 hektar lahan dan menutupinya dengan lumpur dan lumpur. Kurang dari satu bulan kemudian, pada bulan Agustus 16-18, Badai Tropis Bebinca melanda Vietnam dan Laos , menyebabkan banjir dan dampak sekunder terkait di 116 kabupaten dan 2.400 desa di seluruh provinsi negara dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan perumahan dan infrastruktur dan kerugian pertanian tanah dan mata pencaharian, di antara efek lainnya. Secara agregat Syaratnya, per 15 Oktober 2018, banjir sudah berdampak total 2.382 desa dan 126.736 kepala keluarga, dengan perkiraan total 616.145 orang, di semua 18 provinsi. (PDNA, 2018). Dampak dari dua gelombang bencana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Rangkuman Kerusakan Dan Kerugian Di Laos Akibat Banjir 2018

SECTOR	AS OF AUGUST 2, 2018	AS OF SEPTEMBER 21, 2018	AS OF OCTOBER 15, 2018
Districts flooded	55	116	--
Villages affected	n.a.	2,400	2,382
Households affected	24,000	132,000	126,736
People affected	--	--	616,145
Fatalities	13	55	56
Evacuees	~6,000	~17,000	16,739
Missing	--	--	35
Houses destroyed	n.a.	1,772	1,779
Schools affected	n.a.	272	--
Roads flooded/damaged (km)	31	483	630
Bridges damaged	14	47	47
Paddy damaged (ha)	55,000	~100,000	90,000
Cropland damaged (ha)	n.a.	7,400	--
Large livestock losses	n.a.	17,000	--
Poultry losses	n.a.	79,000	--

Sumber: Estimasi Berdasarkan Pemerintah Laos.

Pemerintah Laos telah memimpin dan mengkoordinasikan operasi tanggap melalui Bencana Nasional Komite Pencegahan dan Pengendalian yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri, dan dengan Departemen Kesejahteraan Sosial di Kementerian Tenaga Kerja dan

Kesejahteraan Sosial sebagai koordinator utama. Pada tanggal 25 Juli 2018, Perdana Menteri Laos mendeklarasikan Kota Sanamxay sebagai Kota Nasional Zona Bencana Darurat dan disambut internasional dukungan melalui Pencegahan Bencana Nasional Laos dan Komite Kontrol. Setelah Attapeu dalam acara tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan berbagai pihak mitra pembangunan untuk mengamankan dukungan untuk segera bantuan kemanusiaan, termasuk pencarian dan penyelamatan operasi, distribusi barang bantuan, penerapan bantuan dan persediaan medis, pendirian tempat penampungan dan kamp, bantuan korban, dan kegiatan relokasi. Pada 3 September 2018, pemerintah meminta komunitas internasional untuk membantu pascabencana analisis kebutuhan (PDNA, 2018).

Tim Kemanusiaan Negara meluncurkan rencana tanggap bencana senilai US\$43 juta melengkapi tanggapan pemerintah di seluruh negeri untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada orang-orang yang terkena dampak banjir dan membangun kembali layanan dasar; mendukung pemulihan mata pencaharian dan kemandirian; dan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi orang-orang yang rentan.

Pada Oktober 2018, sekitar US\$8 juta telah dimobilisasi, termasuk US\$3,5 juta dari Pusat Dana Tanggap Darurat, serta kontribusi dari sumber bilateral, termasuk Australia, Irlandia, Republik Korea, Turki, dan Amerika Serikat. Tanggapan dikoordinasikan oleh delapan kemanusiaan cluster, menyatukan Pemerintah Laos , Badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan internasional organisasi non-pemerintah. Cluster termasuk pendidikan, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, perlindungan, tempat berlindung, air, sanitasi, kebersihan, logistik, dan pemulihan dini. Pemerintah dari Australia, China, Jepang, Korea, Thailand, dan Vietnam, antara lain juga memperpanjang keadaan darurat bantuan. Bank dunia mendukung keadaan darurat perbaikan jalan dan jembatan di daerah yang terkena bencana di jumlah sekitar US\$4 juta melalui penyesuaian dalam proyek transportasi yang sedang berjalan (PDNA, 2018).

Sementara negara ini mengejar pertumbuhan ekonomi hijau. Laos juga bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan dan kegiatan berorientasi keuntungan tidak akan meningkatkan tekanan pada tanah, air, lingkungan, dan sumber daya alam yang melimpah di Laos. Namun, membatasi trade off antara keuntungan pembangunan dan Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) dan ketahanan iklim diantisipasi sebagai tantangan utama untuk tahun-tahun mendatang. Meskipun hal ini tampaknya bertentangan dengan kebijakan perusahaan lahan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, cara yang lebih strategis untuk mengontrol dan memantau pembangunan dari perspektif risiko bencana harus dirumuskan dan diterapkan secara ketat dengan perangkat seperti zonasi penggunaan lahan,

perencanaan tata ruang, AMDAL, Integrasi Kajian Lingkungan Strategis serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (PDNA, 2018).

Mengoptimalkan jasa ekosistem untuk PRB masih belum dieksplorasi. Potensi fungsi ekologis yang belum dimanfaatkan untuk pengurangan risiko banjir dan kekeringan dapat lebih diperhatikan. Pemerintah memiliki peran unik untuk dimainkan dalam memfasilitasi proses konsultatif dan partisipatif masyarakat yang menggabungkan praktik-praktik teknis yang baik dengan kearifan lokal dan cara hidup untuk keuntungan maksimal masyarakat sekitar dan populasi rentan.

Meskipun mengalami lebih sedikit bahaya dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, kerentanan demografis di Laos dalam hal aspek sosial-ekonomi, terkait dengan keterpencilan dan akses terbatas ke layanan dasar, menimbulkan tantangan besar bagi pengurangan kemiskinan dan kemajuan substansial dalam pengurangan risiko. Meningkatkan sinergi dan manfaat bersama dari intervensi dan hasil SDGs dan SFDRR adalah bidang penting yang harus dikejar. Berdasarkan pengalaman Kementerian Perencanaan dan Investasi (MPI) dan kementerian terkait, memadukan PRB ke dalam proyek dan program pembangunan sektoral dan ke dalam skema pembangunan pedesaan dapat lebih dipromosikan sebagai metode yang efektif untuk mengurangi kerentanan multi aspek, dan untuk meningkatkan kinerja sektoral dengan meminimalkan potensi dampak bencana pada investasi sektoral dan mengurangi realokasi pembangunan anggaran untuk tanggap bencana dan pemulihan.

Mendukung pengumpulan, analisis dan pengelolaan data terkait bencana dan iklim harus menjadi salah satu prioritas tertinggi, mengingat fakta bahwa data dasar untuk bahaya, keterpaparan dan kerentanan saat ini masih kurang. Selanjutnya, sementara beberapa bencana sistem manajemen informasi sudah ada, data tidak selalu tersedia untuk perencana tingkat daerah dan sektor swasta, yang dapat mengambil manfaat dari informasi risiko sektoral yang mendalam. Juga, mendukung pengumpulan dan pemilahan data SADD (sebagai dimandatkan oleh SFDRR) untuk lebih memahami kerentanan dalam konteks Laos, diperlukan. Kapasitas lokal harus ditingkatkan untuk menjamin bahwa bahkan bencana yang lebih kecil dan berulang dapat diukur dan dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian risiko (PDNA, 2018).

Lokalisasi agenda PRB juga harus diperluas dari sekadar pengumpulan data dan fase tanggap menjadi kesiapsiagaan dan pemulihan bencana juga. Organisasi, otoritas, dan masyarakat lokal sering kali memiliki pemahaman kontekstual terbaik tentang kebutuhan dan kesenjangan lokal dan dapat memberikan dukungan yang tak ternilai bagi kegiatan

pengurangan risiko dengan memberikan kontribusi mereka untuk menghindari pendekatan dari atas ke bawah. Selain itu, operator lokal biasanya yang pertama merespons bencana sehingga kapasitas dan kemampuan mereka untuk mempertahankan operasi dan dukungan di komunitas mereka harus ditegakkan dengan cepat, terutama dalam konteks seperti Laos, yang ditandai dengan daerah terpencil dan sulit dijangkau (PDNA, 2018).

Dalam tulisan yang ditulis oleh *The National Committee for Disaster Prevention and Control* (NCDPC) di buku yang berjudul “*2019 Emergency Disaster Preparedness and Response Plan*” Negara Laos, terdapat 3 tahap prosedur kerja standar (SOP) untuk menanggapi bencana di Laos yaitu:

1. *Surveillance, Monitoring and Alert*

Pada periode ini, ia berfokus pada pengawasan, pemantauan dan peringatan dini mengenai bencana yang mungkin terjadi secara alami. Ini juga termasuk pemeriksaan ulang kesiapan dalam hal peralatan, bahan, kendaraan, dan cadangan barang-barang bantuan untuk menanggapi bencana. Perlu juga dilakukan pengecekan kesiapan tim pendukung darurat yaitu: Tim evaluasi darurat, tim eksplorasi dan penyelamatan, tim dukungan medis dan layanan kesehatan, dll.

a. *The Monitoring of Weather and Advance Alert*

Departemen Meteorologi dan Hidrologi, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan memantau, meramalkan dan mengirimkan peringatan mengenai cuaca, badai, curah hujan, dan ketinggian air di sungai-sungai yang dapat menyebabkan bencana dan mempengaruhi kehidupan, aset pemerintah, kolektif dan rakyat sehingga masyarakat, masyarakat dan peduli organisasi dapat mengetahui dan bersiap-siap untuk menghindari kerusakan dan kerugian sebagai akibat dari bencana. Departemen Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, yang sebagai sekretariat NCDPC, akan mengirimkan alarm peringatan sesuai dengan pemberitahuan dari Departemen Meteorologi dan Hidrologi. Secara khusus, pemberitahuan dari ketua NCDPC dikirim ke kementerian lain yang merupakan anggota NCDPC serta ke komite provinsi untuk pencegahan dan pengendalian bencana sehingga pemberitahuan dapat dikirim lebih lanjut kepada panitia di distrik dan tingkat desa.

b. *The Emergency Operations Center (EOC)*

Pusat Operasi Darurat (EOC) terletak di Departemen Sosial Kesejahteraan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan di bawah tanggung jawab NCDPC Sekretariat. Ini digunakan untuk mengendalikan bencana darurat termasuk

pemantauan dan melaporkan tentang situasi bencana. Hal ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah. lembaga dan mitra internasional yang bertanggung jawab atas manajemen bencana di dalam dan di luar negeri (ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on disaster management - AHA).

EOC dapat didirikan di Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial atau di tempat lain ditentukan secara khusus. Kepala sekretariat NCDPC atas nama kepala EOC yang diarahkan dan ditugaskan oleh NCDPC dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengumumkan penggunaan EOC;
- Mengontrol operasi EOC;
- Menempatkan personel ke dalam EOC;
- Mengirimkan peringatan ke titik fokus manajemen bencana di nasional dan tingkat provinsi serta mitra internasional sesuai dengan informasi dari Departemen Meteorologi dan Hidrologi.

Untuk operasi tersebut, pihaknya bekerja sama dengan focal point penanggulangan bencana di tingkat nasional dan provinsi untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak, kerusakan dan kebutuhan mendesak dan kemudian melaporkan kepada ketua NCDPC sehingga dapat memiliki arahan tentang bagaimana menerapkannya.

2. *The Control and Provision of Emergency Aid During the Disaster Incidents.*

Kontrol dan pemberian bantuan darurat selama insiden bencana adalah pembatasan bencana yang terjadi untuk menghindari dampak serius atau kerugian massal pada kesehatan, kehidupan dan aset orang. Perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Memastikan keamanan;
- b. Bantuan darurat;
- c. Pencarian dan penyelamatan orang hilang;
- d. Penilaian kerugian dan kebutuhan mendesak;
- e. Pengiriman bantuan;
- f. Permintaan bantuan;
- g. Memfasilitasi bantuan dari luar negeri;
- h. Pengelolaan bantuan;
- i. Perbaikan infrastruktur yang diperlukan;
- j. Pengumuman sebagai 'Daerah Terdampak Bencana';
- k. Pengumuman untuk membatalkan daerah bencana;
- l. Mengukur untuk mengendalikan bencana.

3. *The Disaster Recovery*

Pemulihan setelah bencana adalah pengembalian mata pencaharian bagi para korban bencana. Ini termasuk memperbaiki, membangun dan memulihkan infrastruktur yang terkena dampak dan / atau rusak oleh bencana kembali untuk situasi normal atau bahkan lebih baik. Tindakan yang harus diambil adalah sebagai berikut:

a. Penilaian Kebutuhan Pascabencana;

Evaluasi kebutuhan setelah bencana adalah penilaian kerugian atau kerusakan dan kebutuhan untuk mengobati mata pencaharian. Ini termasuk restorasi, perbaikan dan pembangunan infrastruktur. rusak akibat bencana.

b. Pengembangan Rencana Pemulihan PascaBencana;

Pengembangan rencana restorasi setelah kejadian bencana adalah perencanaan berdasarkan evaluasi kebutuhan setelah kejadian bencana. Ini untuk mengobati mata pencaharian dan memulihkan infrastruktur di daerah yang terkena dampak bencana.

c. Pemulihan PascaBencana;

Otoritas administrasi lokal, di tempat di mana insiden bencana terjadi, memiliki kepemilikan dalam melaksanakan rencana restorasi yang sudah disetujui dengan berkolaborasi dengan bagian terkait dan semua sektor.

d. Pemantauan Setelah Bencana.

Komite Provinsi dan Kabupaten untuk Pencegahan dan Pengendalian Bencana memiliki kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pemulihan pascabencana dengan bekerja sama dengan otoritas administrasi setempat di mana bencana terjadi. Bagian dan semua sektor dan kemudian melaporkan kepada otoritas administrasi provinsi.

PENUTUP

Dalam menghadapi bencana tahun 2018 di Laos pemerintah laos sudah membentuk Tim Komite Penanggulangan Bencana Nasional (NDMC). NDMC dibentuk menjadi beberapa sektor dari pusat hingga desa yang memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan hukum penanggulangan bencana nomor 71/NA Tahun 2019.

Pada tahap *Surveillance, Monitoring and Alert*, NDMC yang bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi melakukan pengawasan, pemantauan dan peringatan dini mengenai bencana yang mungkin terjadi secara alami dengan cara pemantauan cuaca dan peringatan dini maupun pembentukan pusat operasi darurat. Selanjutnya pada tahap *The Control and Provision of Emergency Aid During the Disaster Incident*, NDMC melaksanakan berbagai upaya antara lain, memastikan keamanan, bantuan darurat, yang hilang ditemukan

atau dicari dan diselamatkan, penilaian kerugian dan kebutuhan mendesak, dan berbagai upaya yang lain.

Pada tahap terakhir yaitu The Disaster Recovery, NDMC melakukan penilaian kebutuhan pascabencana, pengembangan rencana pemulihan pascabencana, pemulihan pascabencana, dan pemantauan setelah bencana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada semua pihak telah membantu terciptanya makalah ini. Pertama ditujukan untuk Bapak Kol Ckm Dr. Achmed Sukendro SH., M. Si. dan Mayjen TNI (Purn) Dr.dr. Heridadi M.Sc selaku dosen yang selalu membimbing dan menyumbangkan ide untuk penulisan ini. Di samping itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ses Prodi dan para staf Prodi Manajemen Bencana Unhan RI yang memberikan baik ilmu maupun cara buatnya jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- PDNA. 2018. *Post-Disaster Needs Assessment 2018 Floods, Lao PDR*. Laos: Government of Lao People's Democratic Republic.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- The National Committee for Disaster Prevention and Control. 2019. *2019 Emergency Disaster Preparedness and Response Plan*.
- Undang-Undang Indonesia no.24 Tahun 2007.
- UNISDR. 2009. *Terminology On Disaster Risk Reduction*. Geneva : United Natio
- While officially. *Lao PDR has 17 provinces and one municipal area, Lao Capital is often included in the count of 18 provinces*.
- Pemerintah Laos, 2014. *Rencana Aksi Pengurangan dan Penanggulangan Risiko Bencana di Pertanian (2014-2016)*. Vientiane: Pemerintah Laos PDR.
- Hukum Penanggulangan Bencana Laos Nomor 71/NA Tahun 2019.
- Paidi. 2012. *Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam Di Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Tindakan Mitigasi Terhadap Bencana Banjir Bandang*. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/tindakan-mitigasi-terhadap-bencana-banjir-bandang> di akses pada 10 Mei 2022.
- <http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=36409> di akses pada 10 Mei 2022.
- <https://bnpb.go.id/definisi-bencana> di akses pada 10 Mei 2022.